

SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KAMPAR



DISUSUN OLEH:

FITRIADI
10675005068

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

PELAKSANAAN FUNGSI PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

FITRIADI
10675005068

Hakekatnya perencanaan pembangunan adalah menyusun program dan kegiatan pembangunann dimana dalam pembangunan terdapat unsure pertumbuhan, perubahan menuju pada keadaan yang diinginkan.

Penelitian ini dilaksanakan Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004, Untuk mengetahui apa saja program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar, Untuk mengetahui bagaimana implementasi program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 orang yaitu pegawai yang bekerja dibidang perencanaan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus yaitu keseluruhan populasi yang ada sehingga bisa dianggap mewakili seluruh pegawai.

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuisisioner dan wawancara. Sedangkan jenis dan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Analisis data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan, dianalisa sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan. Selanjutnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan tersebut.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi perencanaan yang diberikan Pada BAPPEDA berjalan dengan baik.

Dam hal ini penulis menyarankan agar mengetahui peran serta fungsi perencanaan sesuai yang diatur dalam pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004. Agar pelaksanaan tugas yang dibebankan untuk pegawai bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DARTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perencanaan	12
2.2 Pengertian Fungsi Perencanaan.....	13
2.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	15
2.4 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah	16
2.5 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
2.6 Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	22
2.7 Faktor Perencanaan Pembangunan Daerah.....	28
2.8 Hipotesis	29
2.9 Variabel Penelitian	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Bentuk Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Populasi dan Sampel	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Analisis Data	33
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	34
4.2 Struktur Susunan Organisasi	39
4.3 Uraian Tugas (<i>job description</i>) Bagian/Unit Kerja BAPPEDA.....	41
4.4 Aktivitas BAPPEDA	44
4.5 Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan Undang-undang RI	

No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional.....	47
---	----

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	55
5.2 Rekapitulasi Analisis Hasil Penelitian	66

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

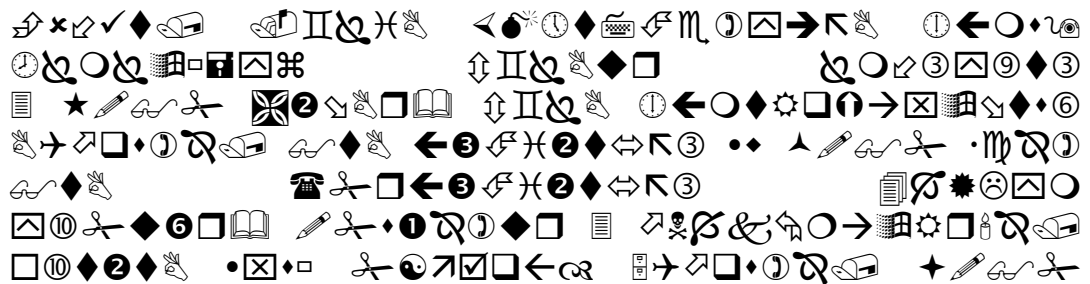
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah pada intinya memerlukan keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sector dengan mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Setiap daerah perlu prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam upaya bagi penungkatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama daerah pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.

Guna tercapainya keselarasan dalam keterpaduan tersebut diperlukan proses yang berlangsung terus menerus dan berencana. Kontinuitas pembangunan serta keberhasilannya disegala bidang ditentukan oleh keterlibatan berbagai instansi yang merupakan pelaku atau subjek pembangunan. Partisipasi yang diberikan merupakan salah satu bentuk keterlibatan instansi terkait dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan menuju hasil yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :



5. Akan menimbulkan efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa suatu tujuan dapat dicapai dengan efektif jika didala perencanaan terdapat tujuan yang jelas. Alternatif-alternatif yang akan terjadi dengan langkah antisipasinya serta perkiraan biaya yang tepat dan cermat. Oleh karena itu didalam perencanaan harus jelas apa yang harus dikerjakan, kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan siapa yang mengerjakannya.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-qur`an:



*Artinya: Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (Ath
Thaariq)*

Adapun langkah-langkah pokok dalam perencanaan dikemukakan oleh **James A. F Stoner (1986: 155)** sebagai berikut:

1. Tetapkan suatu sasaran atau perangkat sasaran, tanpa adanya ketetapan yang jelas tentang sasaran-sasaran sumber daya akan menyebar terlalu luas sehingga akan menyulitkan penentuan prioritas dan pemaparan secara tegas mengenai tujuan yang memungkinkan terpusatnya sumber-sumber daya secara efektif.
2. Defenisikan situasi saat ini, hal ini dimaksudkan agar sumber daya yang tersedia sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk membuat peta-peta kemajuan selanjutnya.
3. Identifikasi faktor apa yang dapat membantu dan faktor apa yang mungkin menimbulkan persoalan.
4. Kembangkan suatu perangkat-perangkat untuk mencapai sasaran langkah ini adalah tindakan evaluasi dengan memeriksa alternatif serta memilih yang sesuai dari alternatif itu.

Semua langkah-langkah pokok dalam perencanaan yang dikemukakan tersebut memberikan gambaran bahwasanya hal yang menjadi titik tumpu dari sebuah rencana adalah sumber daya. Sumber daya yang ada diurutkan dengan skala prioritas

berdasarkan pertimbangan aspek keperluan, kebutuhan, dana atau biaya, waktu pelaksanaan dan lain sebagainya untuk selanjutnya membuat peta-peta kemajuan dengan mendefensikan situasi saat ini dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dibelakang seperti perubahan standart. Perkembangan perekonomian dan politik internasional sehingga rencana tersebut fleksible dan mudah mengikuti perubahan jika terdapat kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan. Langkah antisipasi tersebut juga harus didukung oleh adanya pengidentifikasian faktor-faktor yang akan membantu kelancaran proses pembangunan dan faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat, sedangkan untuk membantu sejauh mana keberhasilan rencana pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuan perlu adanya tindakan evaluasi yang disusun menjadi perangkat-perangkat berdasarkan persetujuan bersama.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan adalah menyusun program dan kegiatan pembangunan dimana dalam pembangunan terdapat unsur pertumbuhan, perubahan menuju pada keadaan yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya upaya berupa strategi atau kebijakan yang tepat sehingga apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat menjadi terwujud. Dengan kata lain pembangunan dalam prosesnya harus bergerak menuju suatu masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih merata. Dengan demikian pemerintah harus melakukan intervensi dalam menerapkan model kesamarataan dalam pembangunan, yang memberikan peluang terhadap berbagai unsur pembangunan untuk selanjutnya berperan dalam kegiatan pembangunan.

Definisi dari pembangunan itu sendiri adalah suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut diatas tampak bahwa pembangunan itu dilaksanakan secara terus menerus yang dilakukan dengan terencana oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan daerah merupakan suatu aspek yang menentukan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Fungsi perencanaan itu sendiri adalah sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan usaha: prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa mendatang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan kewajiban mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya, kepala daerah dibantu oleh sebuah institusi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar. Institusi

ini bertugas untuk menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Tujuan dibentuknya BAPPEDA sebagai organisasi perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berjangka waktu tahunan, lima tahun serta jangka panjang. Selain itu dengan adanya BAPPEDA maka kegiatan perencanaan pembangunan daerah akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dijelaskan fungsi perencanaan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 23 sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”.

Hal ini berarti perencanaan merupakan awal kegiatan dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pembangunan yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena perencanaan tersebut dapat memberikan arah dari tujuan yang ingin dicapai serta merupakan pedoman sebagai standart atau ukuran untuk mengurangi ketidak pastian serta perubahan dimasa mendatang dan sebagai alat ukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan.

Menurut T. Hani Handoko (2003: 77-78), perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan

keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar mempunyai peran dan fungsi dalam program perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD.
2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD.
3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi dalam program perencanaan pembangunan daerah permasalahan strategis yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya sistem/mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. SKPD belum seutuhnya memahami sistem perencanaan pembangunan daerah dan adanya kecenderungan proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana BAPPEDA menyusun pelaksanaan terhadap fungsi perencanaan pembangunan daerah melalui judul penelitian:

“PELAKSANAAN FUNGSI PERENCANAAN PADA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004.
2. Apa saja program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.
3. Bagaimana implementasi program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui apa saja program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pihak instansi khususnya pada BAPPEDA Kabupaten Kampar. Terutama ketetapan waktu dalam melaksanakan fungsi perencanaan.
2. Sebagai bahan petunjuk atau bahan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.
3. Untuk menambah pengetahuan penulis terhadap penerapan serta pengembangan ilmu-ilmu administrasi negara yang penulis peroleh selama kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Batasan Masalah

BAPPEDA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dari kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan melalui mekanisme musrenbang.

BAPPEDA terdiri dari:

Memfokuskan pada fungsi perencanaan yang merupakan tugas pokok BAPPEDA Kabupaten Kampar. Mengingat luas cakupan perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Kampar yang meliputi 21 sektor pembagian sumber dan lebih

dari 30 satuan kerja, maka penelitian ini lebih difokuskan pada program, kegiatan, SDM, sarana dan prasarana serta waktu perencanaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan skripsi, diantaranya berupa pengertian Perencanaan Pembangunan, variabel yang menentukan pelaksanaan dan perencanaan serta batasan lain yang dianggap perlu sebagai pedoman dalam tahap penganalisaan masalah, hipotesis dan variabel penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi sejarah singkat BAPPEDA, struktur organisasi dan rincian tugas pokok pegawai dan sarana dan fasilitas kerja pegawai.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi variabel, analisis hasil penelitian serta upaya meningkatkan ketetapan dalam waktu pelaksanaan perencanaan.

Bab VI : Kesimpulan dan saran

Pada bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan uraian pada bab-bab terdahulu dan memberikan saran-saran sumbangan pikiran pertimbangan dalam bidang personalia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Perencanaan

Demi tercapainya tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, keberadaan dan kelangsungan organisasi sangat diperlukan dengan adanya seorang pimpinan yang merupakan penanggung jawab berhasil tidaknya suatu organisasi, sebab pimpinan organisasi dituntut untuk dapat menggerakkan, mengarahkan dan membina para bawahannya didalam bekerja agar memiliki tanggung jawab atas beban kerja, untuk itu jelasnya keberhasilan organisasi dan kemampuan pimpinan dalam menggerakkan anggota organisasi mutlak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan, yaitu terhadap pelaksanaan perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 25 Tahun 2004).

Salah satu maksud perencanaan adalah melihat bahwa program-program dan penemuan sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang baik. Kesalahan dalam mengambil keputusan perencanaan memang sering

terjadi dalam organisasi ditingkat manapun, untuk beberapa pengamatan ahli, hambatan dalam perumusan kebijakan perlu diketahui secara dini.

Ada juga yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu keputusan apa yang diharapkan dalam waktu yang akan datang (Soewarno Handayuningrat, 1990: 125).

Rencana adalah alat atau sarana yang diciptakan manusia untuk menunjang usahanya, dan karenanya harus disusun secara realitas berdasar kenyataan kemampuan agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

Perencanaan akan membentuk manusia pengusaha yang berkepribadian baik, bekerja lebih disiplin dan meningkatkan daya guna dibidang pelaksanaan kerja (Sutanto, 1998: 41).

2.2 Pengertian Fungsi Perencanaan

Menurut Sondang P. Siagian, (2002: 36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai “pengambilan keputusan sekarang hal-hal yang akan dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dimasa akan datang”.

Menurut T. Hani Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan:

1. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi.
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, system anggaran dan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya dalam perencanaan itu sendiri terdapat empat tahap perencanaan yaitu:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara efektif.

2. Merumuskan tujuan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan (T. Hani Handoko, 2003: 79).

Menurut James A.F Stoner, (1996: 112). Mengungkapkan beberapa langkah dasar dalam perencanaan:

1. Tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu organisasi sub unit. Tanpa ada ketetapan yang jelas tentang sasaran, maka sumber daya organisasi akan terpecah secara luas. Penentuan prioritas dan pemaparan secara tegas mengenai tujuannya memungkinkan organisasi dapat memusatkan sumber dayanya secara efektif.
2. Definisikan situasi saat ini. Beberapa jauh organisasi atau sub unit itu dari sasaran-sasarannya hanya setelah keadaan sekarang dianalisis, maka rencana dapat disusun untuk membuat rencana selanjutnya.
3. Identifikasikan hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

Henri Fayol sebagaimana dikutip Husni Thamrin Pane, (1992: 143) menetapkan perencanaan sebagai langkah yang pertama dan dalam banyak hal sebagai yang terpenting dari kelima langkah yang diidentifikasikannya sebagai bagian dari proses administrasi. Dan kata Fayol menyebutkan perencanaan adalah melihat kedepan, melihat kedepan agar memperoleh ide yang jelas dari pada yang akan dilakukan ke empat langkah yang lainnya, katanya, organisasi, perintah (*command*), koordinasi, dan pengawasan.

Fungsi perencanaan adalah sekumpulan langkah-langkah yang berhubungan yang dengannya manajemen menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana akan dilaksanakan. Gibson, Dkk, (1995: 174).

Fungsi perencanaan adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang akan dilakukan dimasa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Heidj Rachman R, 1990: 41).

2.3 Pengertian Perencanaan pembangunan

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo,1996).

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of development).

Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (*development objective/plan objective*).
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.4 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah dibahas di depan dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Akhirnya untuk mencapai hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan partisipasi dari para *stakeholders* di daerah serta keseriusan dan kerelaan pusat memberikan pembinaan dan dukungan. Tanpa keterlibatan para *stakeholders* dan dukungan pusat tersebut akan sulit bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun mekanisme yang akan dilakukan oleh BAPPEDA adalah melalui MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Adapun tahapan Musrenbang adalah:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, dimana aspirasi masyarakat dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar kelompok-kelompok masyarakat. Perempuan dan kelompok perempuan harus ikut berpartisipasi untuk memasukkan agenda kebutuhannya dalam forum Musrenbangdes/Musrenbangkel tersebut.

Keluaran dari Musrenbang di tingkat ini adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan tersebut. Pada tahap ini juga ditetapkan daftar nama 3–5 orang delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Menurut SE Menteri Negara untuk Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri, perempuan harus ada dalam komposisi delegasi. Untuk itu, disini perlu sungguh-sungguh dipastikan bahwa dalam delegasi terdapat perwakilan perempuan.

2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari, Keluaran dari Musrenbang di tingkat kecamatan ini menetapkan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Prioritas kegiatan pembangunan ini

disesuaikan menurut fungsi SKPD dan penetapan anggaran yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya.

Hasil penetapan daftar prioritas ini kemudian disampaikan oleh masing-masing delegasi kepada masyarakat pada masing-masing desa/kelurahan.

Pada tahap ini juga ditetapkan delegasi untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Perwakilan perempuan harus dipastikan masuk dalam delegasi tersebut.

3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dilaksanakan antara bulan Februari dan bulan Maret.

Keluaran dari Forum ini adalah:

- a) Rancangan Rencana Kerja-SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang akhirnya menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi dan APBN.
- c) Menetapkan delegasi dengan memperhatikan komposisi perempuan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

4. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret.

Keluaran dari Musrenbang Kabupaten/Kota ini adalah:

- a) Arah kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana berdasarkan fungsi SKPD.
- b) Daftar prioritas yang sudah dibahas pada forum SKPD.

- c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
- d) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

Dalam upaya menjaga konsistensi keluaran dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka dilakukan beberapa forum *multistakeholders* Paska Musrenbang antara delegasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD. Selain itu forum tersebut juga bertugas untuk memberikan penjelasan alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan.

5. Forum SKPD Propinsi dilaksanakan pada bulan Maret.

Keluaran dari Forum ini adalah:

- a) Rancangan Rencana Kerja (Renja-SKPD) memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD propinsi.
- b) Menggabungkan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD Propinsi.
- c) Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan Renja-SKPD Propinsi.
- d) Forum juga menetapkan delegasi dengan memperhatikan komposisi perempuan untuk mengikuti Musrenbang Propinsi.

6. Musrenbang Pusat pada bulan Maret.

Keluarannya adalah:

- a) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- b) Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)
Acuannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang sedang berlaku.
- c) Pesertanya adalah seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan seluruh Gubernur (u.p. Kepala Bappeda Propinsi) sebagai peninjau.

7. Musrenbang Propinsi pada bulan April, merupakan tahap pemutakhiran RKPD Propinsi serta tahap penyelarasan RKP dan Renja-KL dengan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.

8. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada bulan April, pada tahap ini hasil Musrenbang Propinsi disampaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Kepala Bappeda Propinsi untuk disepakati sebagai program prioritas pembangunan nasional, prioritas pendanaan RAPBN dan rancangan akhir RKP untuk disampaikan dan dibahas dalam sidang kabinet.

2.6 Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai suatu rencana pembangunan daerah yang komprehensif, maka terbagilah beberapa pokok supaya usaha atau kegiatan perencanaan untuk dapat sampai kepada suatu rencana yang komprehensif, yaitu:

Pokok-pokok langkah untuk mencapai suatu rencana pembangunan daerah tersebut terbagi 13 pokok yaitu:

1. Analisis keadaan saat ini.
2. Penentuan: proyeksi, tujuan, strategi, dan sasaran.
3. Perumusan: program dan proyek.
4. Penjadwalan tindakan: analisis jaringan kerja.
5. Realitas saat ini.
6. Citra masa depan.
7. Tindakan yang diperlukan: (jembatan saat ini ke depan).
8. Skenario bagi usaha pembangunan.
9. Perumusan rencana.
10. Balikan.
11. Implementasi terhadap rencana.
12. Proses perencanaan.
13. Proses pembangunan. (Gunawan Sumodiningrat, 1997: 18)

Dari bagan tersebut diatas, bahwa usaha kegiatan perencanaan untuk sampai kepada suatu rencana, langkah pemula yang penting adalah melakukan “analisis terhadap kegiatan saat ini”. Analisis demikian dilakukan dalam bentuk menemuk-tunjukkan permasalahan daerah yang bersangkutan. Jika pengungkapan atau identifikasi ini tepat, maka tahap-tahap selanjutnya dapat diharapkan akan berlangsung dengan tepat pula, tanpa terlalu banyak menimbulkan kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan. Sedangkan maksud dari perencanaan itu menurut Bintoro Tjokroamidjojo, (1995: 13) adalah perencanaan dalam arti seluas-

luasnya tidak lebih suatu proses mempersiapkan secara sistematis bagian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan ini adalah tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaanpun tidak ada, perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa kesatuan. (Richard L. Daft, 2002: 259).

Jadi dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan berguna untuk mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Husein Umar (2001: 115) Perencanaan adalah suatu organisasi, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam menyusun suatu perencanaan. Perencanaan penting karena didalamnya digariskan secara jelas dan tepat tujuan-tujuan, baik yang berjangka panjang, maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Perencanaan yang baik, akan sangat berperan dalam menunjang pembangunan, karena perencanaan yang baik akan memberikan peranan sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan.
2. Mengetahui kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
3. Menjelaskan sumber-sumber dan atau bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tip kegiatan.
4. Menentukan lamanya tip kegiatan.
5. Menentukan urutannya, apabila ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. (Moekijat, 1996: 97-98).

Kelancaran tugas administrasi adalah pelaksanaan tugas atau pekerjaan didalam organisasi secara tepat dan baik. Untuk kelancaran tugas tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maka harus dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Penguasaan atas tugas.
Yang dimaksud dengan penguasaan tugas adalah pegawai memahami dan mengenal pekerjaan serta mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi tepat dan cepat.
2. Kemampuan bekerja sama.
Yang dimaksud dengan kemampuan bekerja sama adalah pegawai mampu untuk bekerja sama dengan orang lain menurut waktu tertentu dan dalam bidang tugas yang telah ditentukan secara baik dan benar.
3. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
Yang dimaksud dengan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan.
4. Penilaian laporan hasil kerja yang tepat.
Yang dimaksud dengan penilaian laporan hasil kerja yang tepat adalah dalam melaksanakan tugas pegawai harus melaporkan hasil kerja menurut keadaan yang sebenarnya secara benar dan tepat waktu. (Suprihanto, 1996: 99).

Dari uraian kegiatan perencanaan tersebut diatas jelaslah bahwa hal tersebut merupakan persyaratan manajemen yang terus-menerus dalam kebanyakan organisasi, lagi pula dalam kebanyakan organisasi tugas perencanaan itu dibagi kedalam bermacam-macam tingkat oleh semua tingkat manajemen.

Agar tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka tentu saja harus disusun suatu perencanaan yang baik. Suatu perencanaan dikatakan baik apabila dapat menjawab dengan sebaik-baiknya 6 (enam) unsur pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa (What), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
2. Mengapa (Why), yakni alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan.
3. Bagaimana dan berapa (How and Much), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia.
4. Dimana (Where), yaitu pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyeksi).
5. Kapan (When), yaitu pemilihan waktu timing yang tepat.
6. Siapa (Who), yaitu menentukan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ia merupakan subjek pelaksanaan. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa sebagai objek pelaksanaan kegiatan, siapa disini merupakan "whom". (Malayu Hasibuan, 2006: 112-113).

Selanjutnya menurut Heidj Rachman R (1990: 46-47) karakteristik rencana yang baik adalah: rencana yang dapat dipraktekkan atau yang dapat dilaksanakan. Mengingat para pelaksana rencana terdiri dari berbagai macam orang dengan segala perbedaannya (perbedaan dalam pendidikan, pengalaman, sikap dan lain-lain) serta adanya berbagai situasi dalam pelaksanaan, maka rencana yang baik adalah rencana yang sederhana, serta luwes atau fleksible dalam menghadapi perubahan situasi. Rencana yang efektif dapat dinilai dari segi:

- a. Kegunaannya, rencana akan efektif apabila rencana itu berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Ketetapan waktu, rencana akan efektif kalau rencana tersebut mampu akan menjamin ketetapan waktu pelaksanaannya.
- c. Biaya, rencana efektif adalah rencana yang disusun dan pelaksanaannya tidak memerlukan biaya yang tinggi yang melebihi hasil yang dicapai dengan rencana tersebut.
- d. Obyektif, rencana yang efektif adalah rencana yang obyektif artinya rencana tersebut mengandung unsur-unsur obyektivitas yang tinggi dan tidak disadari oleh unsur subyektivitas yang tinggi.
- e. Lengkap, terpadu dan konsisten. Rencana yang efektif adalah rencana yang lengkap dalam hasil isi, terpadu dalam koordinasi dan konsisten dalam penerapannya.

Perencanaan dilihat sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebuah baik, adapun alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan.
2. Dengan perencanaan, maka dilaksanakan suatu pikiran terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek serta resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standart untuk mengadakan pengawasan/evaluasi.
6. Dengan adanya perencanaan, penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif, diusahakan dihindarkan pemborosan-pemborosan.

Suatu rencana yang baik didalam arti bahwa rencana itu memenuhi paling sedikit lima karakteristik. Sondang P. Siagian (1995: 80) mengemukakan lima karakteristik tersebut yaitu:

- a. Rencana berkaitan langsung dengan tujuan dan berbagai sasaran yang hendak dicapai.
- b. Rencana merupakan langkah awal penjabaran dari kebijaksanaan dan strategi yang telah dianalisis dan dirumuskan, serta berbagai keputusan yang telah diambil tentang berbagai segi kehidupan organisasi.
- c. Rencana terwujud dalam keputusan tentang kegiatan yang akan diambil tentang berbagai segi kehidupan organisasi.
- d. Segala sesuatu yang termasuk dalam rencana sudah merupakan hasil perhitungan yang cermat dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolut.
- e. Dalam rencana terdapat petunjuk yang jelas tentang penjabaran lanjut, terutama dalam bentuk program kerja.

Keberhasilan pencapaian tujuan membutuhkan kemampuan jenis lain dari perencanaan. Selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perumusan rencana yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien.

Menurut Alex. S. Nitisemito, (1995: 52) mengemukakan tahapan perumusan rencana yang baik yaitu penetapan tujuan pengumpulan data serta penetapan dugaan ataupun ramalan-ramalan. Menetapkan alternatif cara bertindak, mengadakan penilaian alternatif dan memilih alternatif. Setelah tujuan didasarkan data yang akurat ditetapkan, pihak perencanaan wajib melakukan tindakan penentuan, penilaian, serta pemilihan alternatif.

Menurut Billy E. Goetz sebagaimana yang dikutip oleh Malayu Hasibuan, (2006: 92) perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul, jika terdapat alternatif-alternatif.

Selanjutnya menurut Agus Dharma, (2001: 28-29). Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Yang terdiri dari kegiatan menyusun rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan merupakan uraian mengenai cara pencapaian sasaran sebuah rencana yang baik paling sedikit tiga komponen antara lain:

- a. Merumuskan langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari sasaran yang menggambarkan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
- b. Identifikasi sumber daya. Dalam langkah ini dialokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Sumber daya ini mencakup antara lain manusia, peralatan, anggaran, waktu, metode, dan sebagainya.
- c. Menyusun jadwal kegiatan. Jika kegiatan dan sumber daya telah ditetapkan, selanjutnya disusun jadwal pelaksanaan rencana.

2.7 Faktor Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu. Pertama, waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Kedua, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel dan alternatif, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan. Ketiga, jumlah waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan.

Perencanaan yang dilakukan pada Tahun 2008 adalah untuk menyusun RKP dan RKPD Tahun 2009, diselenggarakan mengacu aturan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.
- b. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2009.
- c. Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RKP dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2009.
- d. Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April, setelah penyelenggaraan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Rakorpus RKP.
- e. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April 2009, setelah penyelenggaraan Musrenbang Provinsi.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis uraikan diatas dan dihubungkan dengan telaah pustaka maka penulis mencoba memberikan hipotesis “Diduga pelaksanaan fungsi perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Kampar belum maksimal sesuai peran dan fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004”.

2.9 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan membahas masalah yang sedang dihadapi organisasi dengan melihat beberapa aspek yang termasuk dalam variabel-variabel penelitian.

Adapun variabel-variabel tersebut adalah:

a. Program

Menurut pengertian secara umum, “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Dalam buku yang lain Suharsimi (2008: 291) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Dengan demikian dapat program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

b. Kegiatan

Secara umum kegiatan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjalankan suatu program.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang atau manusia yang merupakan suatu kemampuan tertentu.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dapat diartikan berupa alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan prasarana adalah tempatnya.

e. Waktu

Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004”.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar pada tahun 2010.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi, yakni: berupa administrasi dan Perencanaan Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari bagian Perencanaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya sejarah Badan BAPPEDA Kabupaten Kampar, keadaan dan struktur organisasi tugas pokok bagi Perencanaan Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian).

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 81 orang yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (**Iqbal, 2005: 84**).

Dengan pertimbangan, bahwa jumlah populasi yang besar, maka dalam penelitian ini, jumlah sampelnya adalah sebanyak 20 orang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam usaha pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu para pegawai BAPPEDA Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan “Tanya Jawab” secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dihubungkannya dengan penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan, dianalisa sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk table-tabel yang lengkap dengan penjelasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dibidang Perencanaan dan Statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 dikelompokkan dalam Lembaga Teknis Daerah, yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan.

Visi BAPPEDA

Visi dapat dimaksudkan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari defenisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara bersama-sama didalam jajaran dan unit kerja organisasi Bappeda, memiliki komitmen untuk eksis, antisipatif, proaktif dan inovatif di masa depan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menghadapi lingkungan internal dan eksternal daerah, memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap perkembangan permasalahan pembangunan secara lokal, regional maupun global. Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu kepada Visi Kabupaten Kampar, yaitu: "Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020" dan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kampar terpilih untuk periode 2006-2011, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, Sejahtera, dan Agamis pada Tahun 2011" maka Bappeda Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya.

Untuk itu, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan VISI yang hendak dicapainya, yaitu: "Menjadikan Institusi yang Akomodatif, Lokomotif dan Andal (ALA) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2027"

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi dimaksud adalah : Akomodatif yaitu menggambarkan sifat yang aspiratif dan menyesuaikan diri serta menjaga keharmonisan dalam hubungan koordinasi dengan lembaga atau pihak tertentu. Lokomotif yaitu penggerak atau penarik “Gerbong” dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar. Andal yaitu memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam merumuskan dan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan, serta memiliki kemampuan dan kepekaan di dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara kontinyu. Selain itu kehandalan juga dimaksudkan memiliki sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, beriman serta bertaqwa dan mampu bertindak sebagai inisiator dengan semangat dan motivasi yang tinggi sehingga senantiasa mampu melakukan tindakan-tindakan perubahan yang terarah dan jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pernyataan visi tersebut diharapkan akan menjadi dorongan bagi seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kampar untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang diinginkan.

Misi BAPPEDA

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan di atas merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka Bappeda Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Bappeda Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan Misi, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Bappeda Kabupaten Kampar dan mengetahui tugas, fungsi, peran dan program kerja serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut telah melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.

Adapun pernyataan MISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kampar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Secara Efisien dan Efektif.
2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelaku Perencana Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Integratif dan Implementatif.

Penetapan misi tersebut di atas dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

Misi Pertama

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan, Bappeda Kabupaten Kampar harus secara optimal mengelola tata usaha organisasi menyangkut masalah umum, keuangan, perlengkapan dan peralatan, serta sumber daya manusia. Agar diakui eksistensi (keberadaannya), Bappeda Kabupaten Kampar harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap stakeholders kelembagaan organisasi yang mantap dan dinamis diakui apabila memiliki sifat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya. Integritas.

Misi Kedua

Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pelaku perencanaan pembangunan daerah ditujukan dalam rangka mewujudkan SDM dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat profesional melalui penciptaan sistem jejaring (networking) dan kerjasama antar pelaku perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembentukan perencanaan pembangunan daerah adalah tersedianya SDM yang berkualitas yang ditopang dengan adanya lembaga perencanaan yang kredibilitasnya dapat diandalkan. Dengan demikian, diharapkan berbagai permasalahan yang terkait dengan lemahnya SDM dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dapat segera tertangani.

Misi Ketiga

Perencanaan yang Integratif dan Implementatif:

1. Integratif, bahwa setiap perencanaan harus dilaksanakan secara koordinatif dan sinkron terhadap skala waktu, tingkat pemerintahan, tingkat kepentingan dan skala wilayah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
2. Implementatif, bahwa setiap perencanaan harus dapat dioperasionalkan dan menuju pada penetapan produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Pengendalian yang Integratif dan Implementatif: memiliki maksud, bahwa setiap perencanaan harus ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan berikutnya.

4.2 Struktur Susunan Organisasi

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukannya suatu struktur dan jalur koordinasian antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu. Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu struktur yang efektif dan efisien adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu organisasi bukan sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi, melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan

tanggung jawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan diibidang perencanaan pembangunan didaerah Kabupaten Kampar.

Dalam mencapai tujuannya BAPPEDA Kabupaten Kampar telah menyusun suatu struktur organisasi yang jelas, sehingga mereka dalam bekerja tidak memenuhi kesulitan yang berarti atau tumpang tindih pekerjaan, namun dengan demikian bukan berarti Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar telah dapat mengkoordinasi pegawai dengan baik karena struktur organisasi yang baik, akan tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga memerlukan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi masalah tersebut.

Dibawah ini dapat dilihat struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Susuna Organisasi berikut ini:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah
- d. Bidang Sumber Daya Alam

- e. Bidang Kimpraswil
- f. Bidang PPK, UKM dan Dunia Usaha
- g. Bidang Kesejahteraan Sosial
- h. Bidang Kerjasama Pembangunan
- i. Bidang Statistik dan Pelaporan
- j. Sub Bagian - Sub Bagian
- k. Sub Bidang - Sub Bidang
- l. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3 Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja BAPPEDA

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Kegiatan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Data serta Kegiatan Keuangan dilingkungan Badan. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah

Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan,

pemuda dan olahraga. Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- b. Sub Bidang Potensi SDM, Aparatur Pemerintah dan Iptek.

3. Bidang Sumber Daya Alam

Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan pertambangan, energi, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, ketanahan, pertanian dan perikanan.

Bidang Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.

4. Bidang PPK, UKM dan Dunia Usaha

Bidang PPK, UKM dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha. Bidang PPK, UKM dan Dunia Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bidang Industri dan Perdagangan.
- b. Sub Bidang Koperasi, UKM dan Dunia Usaha.

5. Bidang Kimpraswil

Bidang Kimpraswil mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan pengairan, perumahan, pemukiman, tata ruang dan perhubungan. Bidang Kimpraswil terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengairan, Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang.
- b. Sub Bidang Perhubungan.

6. Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan Agama, Seni Budaya, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kependudukan, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bidang Agama, Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

7. Bidang Kerjasama dan Pembangunan

Bidang Kerjasama dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian ketentuan Kerjasama Pihak Ketiga, Perguruan Tinggi, Antar Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran. Bidang Kerjasama Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kerjasama Pihak Ketiga, Perguruan Tinggi, dan Antar Daerah
- b. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran.

8. Bidang Statistik dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi kegiatan pengumpulan data statistik, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan laporan-laporan kegiatan pembangunan daerah. Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

4.4 Aktivitas BAPPEDA

Secara umum, BAPPEDA Kabupaten Kampar telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dengan dilaksanakannya tugas yang diterangkan dalam rencana strategis (RENSTRA) tahun 2004 yang diwukudkan dalam tahun 2008.

1. Fungsi BAPPEDA adalah:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkungan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada BAPPEDA.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. BAPPEDA Mempunyai Kewenangan Sebagai Berikut:

- a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
- b. Menyusun RENSTRA Kabupaten Kampar.

- c. Menyusun program tahun lainnya sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang dibiayai oleh daerah, atau pemerintah provinsi atau dimasukkan dalam program tahunan nasional.
- d. Melaksanakan/menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan diantara dinas-dinas, badan, kantor dan satuan organisasi serta instansi vertikal, kabupaten/kota, dalam lingkungan wilayah pemerintah daerah.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama-sama dengan bagian keuangan yang dikoordinir oleh sekretaris daerah.
- f. Melaksanakan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada BAPPEDA.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR

Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Melakukan Perencanaan Pembangunan Mengacu Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program Bappeda Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas kewenangan Bappeda Kabupaten Kampar, lintas SKPD, dan lintas kewilayahan. Oleh karena itu, sumber pendanaannya mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, APBD Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun dalam Renstra ini penekanannya lebih kepada sumber dana APBD Kabupaten Kampar.

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan ini terbagi atas:

1. Rencana Kerja Anggaran.

Rencana Kerja Anggaran yang merupakan perwujudan kebijakan internal adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.

2. Rencana Kerja Kerangka Regulasi.

Sedangkan Rencana Kerja Regulasi yang merupakan perwujudan kebijakan eksternal adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan dan penetapan Program dan Indikasi Kegiatan yang dikategorikan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kampar dalam periode 5 tahun mendatang (Tahun 2007 sd 2011). Adapun secara garis besar Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - g) Penyediaan alat tulis kantor.

- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - l) Penyediaan makanan dan minuman.
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - n) Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- a) Pembangunan rumah dinas.
 - b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - c) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.
 - d) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.
 - e) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - f) Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - g) Pengadaan mebeleur.
 - h) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
 - i) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - j) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - l) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar.

- b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - c) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - d) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
 - e) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- a) Pengadaan mesin/kartu absensi.
 - b) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - c) Pengadaan pakaian KORPRI.
 - d) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- a) Pendidikan dan pelatihan formal.
 - b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

b. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

- 1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- a) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - b) Pelatihan pengembangan kapasitas aparatur kelembagaan pemerintah dan organisasi masyarakat desa menghadapi otonomi desa.
 - c) Peningkatan Kemampuan Perencanaan Aparatur Kecamatan.
 - d) Peningkatan kemampuan partisipatif stake holder dalam perencanaan pembangunan.

- 2) Program pengembangan data/informasi
 - a) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja pelaksanaan pembangunan menurut SKPD/Kecamatan/Fungsi.
 - b) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan tertentu.
 - c) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
 - d) Pendamping Penyusunan RT, RW Kabupaten Kampar Dana APBN.
 - e) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.
 - f) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.
 - g) Penyusunan dan Pemetaan data Potensi Ekonomi Kabupaten Kampar.
 - h) Penyusunan profile daerah.
 - i) Penyusunan profil tenaga kerja.
 - j) Penyusunan pengumpulan data dan statistik daerah.
 - k) Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah.
 - l) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB.
 - m) Penyusunan dan pengumpulan data penyelenggaraan pendidikan.
 - n) Penyusunan data dan informasi potensi SDM Desa Kabupaten Kampar.
 - o) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan.
 - p) Refleksi Program 5 Tahun Pembangunan Lingkup Pertanian.
 - q) Penyusunan Sistem Data Terpadu (GIS).

- 3) Program perencanaan pembangunan daerah
 - a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
 - b) Pembinaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
 - c) Penyusunan rancangan RPJPD.
 - d) Penyelenggaraan musrenbang RPJPD.
 - e) Penetapan Peraturan Daerah`RPJPD.
 - f) Penetapan Peraturan Kepala Daerah RPJMD.
 - g) Penyusunan RPJMD 2012 – 2016.
 - h) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
 - i) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2008.
 - j) Penyusunan rancangan RKPD.
 - k) Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD.
 - l) Penetapan RKPD.
 - m) Penyusunan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2007.
 - n) Perencanaan Perda Inplementasi Otonomi Desa Kabupaten Kampar.
 - o) Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Otonomi Desa.
 - p) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kampar.
- 4) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
 - a) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah.
 - b) Penyusunan indikator ekonomi daerah.
 - c) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

- d) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 - e) Penyusunan dan penelitian indikator makro statistik ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2008.
 - f) Penyusunan tabel input output daerah.
 - g) Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.
 - h) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan.
 - i) Kemitraan Pengembangan Bagi Ekonomi Lokal (KPEL) Kabupaten Kampar.
 - j) Workshop Strategi Pengembangan Ekonomi dalam menunjang Otonomi Desa se-Kabupaten Kampar.
 - k) Kajina Indeks Pembangunan Manusia.
 - l) Analisis Daya Saing Daerah.
 - m) Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.
- 5) Program perencanaan sosial dan budaya.
- a) Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan.
 - b) Pembuatan Juknis dan Juklak Block Grant Pendidikan.
 - c) Perencanaan pengembangan pendidikan tinggi.
 - d) Revitalisasi perencanaan dan pengembangan pendidikan.
 - e) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.
 - f) Perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Kabupaten Kampar 2006 – 2010.
 - g) Peningkatan lembaga pengembangan tenaga kerja.

- h) Sinkronisasi pengelolaan tenaga kerja (penyedia, fasilitator dan pengguna).
 - i) Workshop pemantapan kebijakan bidang keagamaan.
 - j) Workshop pemantapan kebijakan bidang hukum, keamanan ketertiban dan penyelesaian konflik.
 - k) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata.
 - l) Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Tim Koordinasi Kabupaten Kampar PAMSIMAS.
 - m) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan: Termonitornya Pembangunan Rumah Layak Huni.
 - n) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- o) Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - p) Penyusunan masterplan pengembangan pertanian.
 - q) Koordinasi Penyusunan Data Base lahan lingkup pertanian Kabupaten Kampar.
 - r) Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kampar
- 7) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- a) Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana.

b. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan

- 1. Program kerjasama pembangunan.
 - a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar berjumlah 81 orang. Terdiri dari Eselon II a berjumlah 8 orang, Eselon III a berjumlah 17 orang, Eselon IV a berjumlah 1, Eselon II b berjumlah 2 orang, Eselon III b berjumlah 14 orang, Eselon IV b berjumlah 2 orang, Eselon III c berjumlah 8 orang, Eselon IV c berjumlah 1 orang, III d berjumlah 11 orang, Non Eselon 3 orang dan termasuk Pegawai Honor sebanyak 14 orang.

Adapun komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah Sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	Eselonering
1.	Kepala	1	IV c
2.	Kepala Bidang	7	III d
3.	Kepala Tata Usaha	1	III a
4.	Kepala Sub Bidang	14	IV a
5.	Kepala Sub Bagian	3	IV a
6.	PNS Biasa	-	-
7.	Honoror	-	-
Jumlah			

Untuk lebih jelasnya Struktur BAPPEDA Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

a) Jenis Kelamin

Pada permulaan penelitian ini akan terlihat jenis kelamin responden dimana hal ini dijelaskan pada tabel V.1 berikut ini:

Tabel V.1: Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Laki - Laki	56	69,13
2.	Perempuan	25	30,86
Jumlah		81	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Jika dilihat dari Tabel V.1 tersebut maka terlihatlah bahwa rata-rata responden penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 56 orang atau 69,13% dan perempuan sebanyak 25 orang atau 30,86%.

b) Golongan Umur

Secara teoritis faktor umur seseorang mempunyai hubungan dan keterkaitan yang kuat dengan kemampuan seseorang dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari. Gambaran mengenai golongan umur yang diambil dari hasil penelitian terhadap orang/pegawai antara lain sebagai berikut:

Tabel V. 2 : Golongan Umur Responden

No.	Golongan umur	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	20 - 30 Tahun	5	6,17
2.	30 - 40 Tahun	37	45,67
3.	40 - Keatas	39	44,44
Jumlah		81	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Dari tabel V.2 dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja Pada BAPPEDA dengan melibatkan komposisi umurnya, maka dapat diketahui bahwa

golongan umur antara 20 sampai dengan 30 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 6,17%, golongan umur antara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 37 orang atau 45,67%, golongan umur antara 40 tahun keatas sebanyak 39 orang atau 44,44%.

c) Masa Kerja

Pada tabel V.3 berikut ini akan kita lihat berapa lama pegawai bekerja di BAPPEDA Kabupaten Kampar.

Tabel V.3: Jumlah Pegawai menurut Masa Lama Bekerja

No.	Lama Masa Kerja	Jumlah pegawai	Peresentase (%)
1.	1 - 10 Tahun	44	54,32
2.	10 - 20 Tahun	23	28,39
3.	20 - Keatas	14	17,28
Jumlah		81	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Untuk masa kerja responden terlihat bahwa yang memiliki masa kerja 1 sampai 10 tahun sebanyak 44 orang atau 54,32%, masa kerja 10 sampai 20 tahun sebanyak 23 orang atau 28,39%, masa kerja 20 tahun keatas sebanyak orang 14 atau 17,28%. Maka terlihat pada tabel V.3 ini rata-rata masa kerja responden sudah cukup lama di kantor.

d) Tingkat Pendidikan

Pendidikan seseorang sangat menentukan status pekerjaan yang dilakukan, ukuran pendidikan yang dipakai adalah pendidikan formal yang di milikinya. Jika diperhatikan dari tingkat pendidikan maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	SD	2	2,46
2.	SLTP	4	4,93
3.	SMU	11	13,58
4.	STRATA 1	46	56,79
5.	STRATA 2	18	22,22
Jumlah		81	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan responden di BAPPEDA Kabupaten Kampar cukup bervariasi. Dimana yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang atau 2,46% berpendidikan SLTP sebanyak 4 orang atau 4,93%, yang berpendidikan terakhir SMU sebanyak 11 orang atau 13,58%, berpendidikan terakhir strata 1 sebanyak 46 orang atau 56,79% berpendidikan terakhir strata 2 sebanyak 18 orang atau 22,22%. Di sini terlihat bahwa tingkat pendidikan di BAPPEDA sudah tergolong baik

2. Analisa Terhadap Program Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kampar

Program Bappeda Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan program perencanaan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA maka untuk mengetahui peran dan fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.5: Tanggapan Responden Terhadap Program Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kampar

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	25
2	Baik	9	45
3	Cukup Baik	5	25
4	Tidak Baik	1	5
5	Sangat Tidak Baik	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Dari tanggapan responden terhadap program perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kampar dapat dilihat bahwa terdapat 5 responden (25%) menyatakan sangat baik, 9 responden (45%) menyatakan baik, 5 responden (25%) menyatakan cukup baik, 1 responden (5%) menyatakan tidak baik, 0 responden yang menyatakan sangat tidak baik (0%)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik.

3. Analisis Terhadap Kegiatan yang dilakukan BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Menjalankan Program Perencanaan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang terlaksana yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam menjalankan program perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.6: Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan yang dilakukan BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Menjalankan Program Perencanaan

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Sangat Terlaksana	8	40
2	Terlaksana	9	45
3	Cukup Terlaksana	3	15
4	Tidak Terlaksana	0	0
5	Sangat Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.

Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kampar yang terlihat pada tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa kegiatan BAPPEDA yang diterima dari responden sebagai sampel adalah responden yang menyatakan sangat terlaksana 8 orang responden atau (40%) menyatakan terlaksana 9 orang responden atau (45%), menyatakan cukup terlaksana 3 orang responden atau (15%), menyatakan responden tidak terlaksana 0 orang responden atau (0%), dan yang menyatakan sangat terlaksana 0 orang responden atau (0%).

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan BAPPEDA dalam menjalankan program perencanaan akan terlaksana dengan baik.

4. Analisa Kemampuan SDM

Pada kelangsungan aktifitas anggota organisasi, perlu adanya usaha dari pimpinan organisasi, baik itu dalam meningkatkan kesejahteraan atau pemenuhan kebutuhan para anggota organisasi maupun menciptakan suatu kondisi kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan anggota organisasi oleh pimpinan organisasi yang merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap berhasil tidaknya organisasi yang berada di bawah kepemimpinan, perhatian dan upaya pemenuhan kebutuhan manusia dalam bekerja perlu mendapat perhatian karena pada hakikatnya manusia bekerja pada sebuah.

Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan oleh Badan Perencana Pada BAPPEDA maka untuk mengetahui perkembangan dan arti pentingnya dalam suatu instansi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.7: Tanggapan Responden Tingkat SDM Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Memadai	9	45
2	Memadai	5	25
3	Cukup Memadai	5	25
4	Tidak Memadai	1	5
5	Sangat Tidak Memadai	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.

Dari tanggapan responden tentang pendidikan SDM BAPPEDA Kabupaten Kampar dapat dilihat bahwa terdapat 9 responden (45%) menyatakan sangat

memadai, 5 responden (25%) menyatakan memadai, 5 responden (25%) menyatakan cukup memadai, 1 responden (5%) menyatakan tidak memadai, 0 responden yang menyatakan sangat tidak memadai (0%)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat pendidikan SDM Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar akan tercipta dengan sangat baik.

Tabel V.8: Tanggapan Responden Staf BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Mengambil Kebijakan

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Sangat Membantu	8	40
2	Membantu	9	45
3	Cukup Membantu	3	15
4	Tidak Membantu	0	0
5	Sangat Tidak Membantu	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.

Staf BAPPEDA Kabupaten Kampar yang terlihat pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa Staf BAPPEDA yang diterima dari responden sebagai sampel adalah responden yang menyatakan sangat membantu 8 orang responden atau (40%) menyatakan membantu 9 orang responden atau (45%), menyatakan cukup membantu 3 orang responden atau (15%), menyatakan responden tidak membantu 0 orang responden atau (0%), dan yang menyatakan sangat membantu 0 orang responden atau (0%).

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan staf BAPPEDA merasa terbantu dalam mengambil kebijakan dan akan terlaksana dengan baik.

Tabel V.9: Tanggapan Responden Terhadap SDM Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Dapat	8	40
2	Dapat	6	30
3	Cukup Dapat	5	25
4	Tidak Dapat	0	0
5	Sangat Tidak Dapat	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, 8 responden (40%) menyatakan sangat dapat, 6 responden (30%) menyatakan dapat, 5 responden (25%) menyatakan cukup dapat, 0 responden (0%) menyatakan tidak dapat, 0 responden (0%) menyatakan sangat tidak dapat.

Dari label di atas dapat disimpulkan bahwa SDM yang dimiliki menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional akan dapat terlaksana dengan baik pula.

Tabel V.10: Tanggapan Responden Terhadap Jumlah SDM yang Memiliki Latar Belakang Perencana

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Perlu	10	50
2	Perlu	7	35
3	Cukup Perlu	2	10
4	Tidak Perlu	1	5
5	Sangat Tidak Perlu	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, 10 responden (50%) menyatakan sangat perlu, 7 responden (35%) menyatakan perlu, responden (10%) menyatakan cukup perlu, 1 responden (5%) menyatakan tidak perlu, 0 responden (0%) menyatakan sangat tidak perlu.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM yang memiliki latar belakang rencana sudah dimasukkan kategori sangat baik.

5. Sarana Dan Prasarana

Sarana Dan Prasarana, dalam melaksanakan berbagai aktifitas untuk pencapaian tujuan maka sarana dan prasarana sangat membantu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan. Disini dapat dilihat sarana yang dimiliki pada BAPPEDA Kabupaten Kampar.

Tabel V.11: Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

NO.	SARANA DAN PRASARANA	
1.	Perkantoran	Ruang Rapat Ruang Kerja Ruang Usaha Ruang Parkir Fax/Telpon Internet
2.	Peralatan Kantor	Computer Multi Media Photo Copy AC
3.	Peralatan Pendukung	Genset
4.	Keamanan	Pengamanan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden sarana dan prasarana sudah cukup baik.

Tabel V.12: Tanggapan Responden terhadap Sarana dan Prasarana

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Sangat baik	16	80
2	Baik	4	20
3	Cukup Baik	0	0
4	Tidak Baik	0	0
5	Sangat Tidak baik		0
	Jumlah	20	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Di bawah ini dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana, dari responden yaitu 16 responden atau (16%) yang menyatakan sangat baik, 4 responden atau (20%) menyatakan baik, sedangkan 0 responden (0%) menyatakan cukup baik, 0 responden atau (0%) 0 yang menyatakan tidak baik atau (0%) 0 responden atau (0%) yang menyatakan tidak baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden sarana dan prasarana sudah cukup baik.

6. Waktu

Waktu adalah merupakan pelaksanaan program kegiatan untuk menyusun rencana yang dilakukan instansi pemerintah itu sangat membantu para pegawai, maka disusunlah sebuah instansi. Dengan adanya waktu kegiatan yang akan direncanakan itu berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya Lihatlah tabel di bawah ini.

**Tabel V.13: Tanggapan Responden terhadap Waktu Penyusunan
Perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten
Kampar**

No.	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Sangat Cukup	4	20
2	Cukup	8	40
3	Cukup Sekali	8	40
4	Tidak Cukup	0	0
5	Sangat Tidak Cukup	0	0
	Jumlah	20	100

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kampar, Data Olahan 2010.*

Pada Tabel V.13 dapat dilihat dari responden yang menjawab sangat cukup sebanyak 4 responden (20%), menjawab cukup sebanyak 8 responden (40%) dan menjawab cukup sekali sebanyak 8 responden (40%) dan terdapat 0 responden (0%) yang menjawab tidak cukup dan responden yang menjawab sangat tidak cukup sebanyak 0 responden (0%).

Dengan demikian sesuai tanggapan responden pada tabel di atas menunjukkan waktu penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar memberikan tanggapan baik.

Rekapitulasi Analisis Hasil Penelitian

Hal ini untuk membuktikan validitas data rekapitulasi analisis hasil penelitian maka penulis mengumpulkan data yang membuktikan bagaimana Pelaksanaan Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar, yang meliputi tanggapan Responden terhadap analisis hasil penelitian yang terdiri dari:

1. Kondisi Kemampuan Program dari BAPPEDA Kabupaten Kampar.
2. Kondisi Kemampuan Kegiatan yang dilakukan Oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar.
3. Kondisi Kemampuan SDM.
4. Kondisi Kemampuan Sarana dan Prasarana.
5. Kondisi Kemampuan Waktu.

Selain itu dalam hal untuk membuktikan validitas analisis data hasil penelitian Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar. Dimana data yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar Mengacu Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Hasil Penelitian tersebut dapat dilihat tabel berikut di bawah ini:

1. Program BAPPEDA Kabupaten Kampar

NO.	PROGRAM	PENILAIAN
1	Responden terhadap Program yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar	Baik

2. Kegiatan BAPPEDA dalam Menjalankan Program Perencanaan

NO.	KEGIATAN	PENILAIAN
1	Responden terhadap Kegiatan dalam Menjalankan Program Perencanaan	Baik

3. Kemampuan SDM

NO.	SUMBER DAYA MANUSIA	PENILAIAN
1	Responden tingkat SDM Pada BAPPEDA	Sangat Baik
2	Responden dalam mengambil kebijakan Pada BAPPEDA.	Baik
3	Responden terhadap SDM menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik
4	Responden terhadap jumlah SDM yang memiliki Latar Belakang Perencana.	Sangat Baik

4. Sarana Dan Prasarana

NO.	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BAPPEDA Kabupaten Kampar.	PENILAIAN
1	Perkantoran BAPPEDA a. Ruang Rapat. b. Ruang Kerja. c. Ruang Usaha d. Ruang Parkir.	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
2	Peralatan Kantor BAPPEDA. a. Fax/Telepon. b. Internet. c. Computer. d. Multi Media. e. Photo Copy. f. AC.	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
3	Peralatan Pendukung Kantor BAPPEDA a. Genset	Sangat Baik
4	Keamanan Kantor BAPPEDA a. Pengamanan	Sangat Baik

5. Waktu

NO.	Waktu	PENILAIAN
1.	Responden Waktu Pelaksanaan Program Perencanaan	Baik

Dari Rekapitulasi ini dapat di katakan bahwa BAPPEDA Kabupaten Kampar belum maksimal dalam menjalankan program, kegiatan dan waktu penyusunan perencanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga fungsi perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Kampar dapat di katakan sangat tidak baik dan lainnya sejalan dengan hipotesis yang telah disampaikan.

BAB VI

PENUTUP

Dilihat dari analisis dengan teliti dari pembahasan bab-bab selanjutnya, berikut ini penulis menarik beberapa kesimpulan atas permasalahan ini yang dihadapi oleh bidang perencanaan. Disamping itu penulis juga memberikan masukan berupa saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi BAPPEDA Kabupaten Kampar di masa yang akan datang.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada bidang perencanaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi perencanaan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sudah baiknya pelaksanaan tugas BAPPEDA. Data yang diperoleh membuktikan bahwa fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 sudah baik atau maksimal.
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kampar khususnya dibidang perencanaan juga sudah cukup baik, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sudah berjalan maksimal sesuai ketentuan.

3. Progran dan kegiatan yang telah dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam melaksanakan fungsi perencanaan sudah terimplementasi dengan baik pula.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis berusaha untuk memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat, khususnya di Bidang Perencanaan.

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar khususnya di Bidang Perencanaan, dalam meningkatkan suatu dorongan dan kemauan pegawai dalam bekerja diharapkan akan menyesuaikan kebutuhan pegawai dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan agar keinginan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dalam bekerja semakin meningkat dari para pegawai.
2. Pelaksanaan yang diberikan pimpinan hendaknya perlu ditingkatkan lagi. Karena dengan adanya perencanaan yang baik dari atasan maka segala tugas yang diberikan kepada pegawai pun akan terlaksana dengan baik. Dan juga perlu lebih mengetahui peran serta fungsi perencanaan sesuai yang diatur dalam pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004. Agar pelaksanaan tugas yang dibebankan untuk pegawai bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an, Ar Ra`ad. CV. Aneka Ilmu Semarang, Jl. Semarang-Demak Km. 8,5
- _____, Lugman. CV. Aneka Ilmu Semarang, Jl. Semarang-Demak Km. 8,5
- Arikunto, Suharsamsi, 1996. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi III, PT. Rineka Cipta Anggota IKAPI, Jakarta
- Daft, Richad L, 2001. *Manajemen*. Erlangga, Jakarta
- Dessler, Gary, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Dharma, Agus, 2001. *Manajemen Supervisi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gibson, 1997. *Manajemen*. Edisi 9 Jilid 2, Erlangga, Jakarta
- Gunawan, Sumodiningrat, 1997. *Manajemen Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Handayuningrat, Soewarno, 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung, Jakarta
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. BAFE, Edisi II, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P., 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Mamduh, M. Hanafi, 1997. *Manajemen*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Moekijat, 1996. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. PT. Remaja Rusda Karya, Bandung
- Nitisemito, 1995. *Manajemen Personalialia (Manajemen SDM)*. Edisi III, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pane, Thamrin Husni, 1992. *Administrasi Negara*. Rinika Cipta, Jakarta
- R Rachman, Heidj, 1990. *Tanya-Jawab, Manajemen*. AMPYKPN, Yogyakarta
- Suprihanto, 1996. *Administrasi Pembangunan Daerah*., PT. Cipta Karya, Jakarta

- Susanto, 1998. *Pedoman Perencanaan Bagi Perusahaan Kecil*. Bumi Aksar, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta
- Umar, Husein, 2001. *Study Kelayakan Bisnis*. Edisi II, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

SUMBER-SUMBER:

- BAPPEDA Kabupaten Kampar
- www.Google.com

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan ini hanya kepentingan studi, karena itu mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr. Berkenan mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat pekerjaan.

I. Identitas Responden

1. Kode Responden :.....
2. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
3. Umur :..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir : (1) SD
(2) SLTP
(3) SLTA
(4) S1
(5) S2
(6) S3
5. Pekerjaan/Jabatan :.....

Petunjuk Pengisian :

Beikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr. paling sesuai dengan kenyataan yang ada.

- Penjelasan :
- Pilihan jawaban (a) skor 5 = Sangat Baik
 - Pilihan jawaban (b) skor 4 = Baik
 - Pilihan jawaban (c) skor 3 = Cukup Baik
 - Pilihan jawaban (d) skor 2 = Tidak Baik
 - Pilihan jawaban (e) skor 1 = Sangat Tidak Baik

II. Program Perencanaan

1. Apakah Program yang dibuat oleh BAPPEDA sudah Berjalan dengan baik?
(a) Sangat Baik; (b) Baik; (c) Cukup Baik;
(d) Tidak Baik; (e) Sangat Tidak Baik

III. Kegiatan-kegiatan dalam Menjalankan Program Perencanaan

1. Apakah Semua Kegiatan untuk menjalankan Program yang dibuat sudah terlaksana?

(a) Sangat Terlaksana; (b) Terlaksana; (c) Cukup Terlaksana;
(d) Tidak Terlaksana; (e) Sangat Tidak Terlaksan

IV. Kemampuan Sumber Daya Manusia

2. Apakah tingkat pendidikan SDM BAPPEDA memadai?

(a) Sangat Memadai; (b) Memadai; (c) Cukup Memadai;
(d) Tidak Memadai; (e) Sangat Tidak Memadai
3. Apakah pendidikan staf BAPPEDA membantu Bapak dalam mengambil kebijakan?

(a) Sangat Membantu; (b) Membantu; (c) Cukup Membantu;
(d) Tidak Membantu; (e) Sangat Tidak Membantu
4. Apakah SDM yang dimiliki dapat menyusun program perencanaan sesuai dengan fungsi perencanaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 23 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004?

(a) Sangat Dapat; (b) Dapat; (c) Cukup Dapat;
(d) Tidak Dapat; (e) Sangat Tidak Dapat
5. Apakah perlu penambahan jumlah SDM yang memiliki latar belakang perencana?

(a) Sangat Perlu; (b) Perlu; (c) Cukup Perlu;
(d) Tidak Perlu; (e) Sangat Tidak Perlu

V. Sarana dan Prasarana

1. Apakah dalam melaksanakan tugas didukung oleh prasarana yang memadai misalnya Computer.
2. Telepon
3. Fax
4. Foto Copy
5. Email

VI. Waktu

1. Apakah waktu penyusunan perencanaan dirasa cukup dengan beban tugas

BAPPEDA?

(a) Sangat Cukup;

(d) Tidak Cukup;

(b) Cukup;

(e) Sangat Tidak Cukup

(c) Tidak Cukup;

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V. 1 : Jenis Kelamin Responden	56
Tabel V. 2 : Golongan Umur Responden.....	56
Tabel V. 3 : Jumlah Pegawai Menurut Masa Lama Kerja	57
Tabel V. 4 : Tingkat Pendidikan Responden	58
Tabel V. 5 : Tanggapan Responden Terhadap Program Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kampar	59
Tabel V. 6 : Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Manjalankan Prrogram Perencanaan.....	60
Tabel. V. 7: Tanggapan Responden Tingkat SDM Pada BAPPEDA Kabupaten Kampar	61
Tabel. V. 8: Tanggapan Responden Satf BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam Mangambil Kabijakan	62
Tabel. V. 9: Tanggapan Responden Terhadap SDM Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional	63
Tabel. V. 10: Tanggapan Responden terhadap Jumlah SDM yang Memiliki Latar Belakang Perencana.....	63
Tabel. V. 11: Sarana dan Prasarana yang Dimiliki	64
Tabel. V. 12: Tanggapan Responden Terhadap Sarana dan Prasarana	65
Tabel V. 13 : Tanggapan Responden Terhadap Waktu Penyusunan Perencanaan yang Dilakukan Oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar	46
---	----

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR**

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

